

BAB III

PERMASALAHAN DESA

3.1 Analisa Permasalahan Desa

Pengelolaan bantuan sosial di Desa Bumi Jaya selama ini masih dilakukan secara manual melalui pencatatan di buku administrasi desa. Sistem pencatatan manual ini memiliki banyak kelemahan, di antaranya potensi terjadinya data ganda, kesalahan input, serta keterlambatan dalam proses verifikasi. Kondisi tersebut menyebabkan perangkat desa sering menghadapi kesulitan dalam menentukan siapa yang benar-benar berhak menerima bantuan sosial. Menurut (Prasetyo et al., 2022), “ketidaktepatan data penerima bantuan sosial sering menjadi penyebab konflik sosial di masyarakat desa.”

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa juga menjadi faktor penghambat. Tidak semua perangkat desa memiliki kemampuan dalam mengelola data berbasis digital. Hal ini menyebabkan inovasi dalam pengelolaan administrasi bansos sulit diimplementasikan. Akibatnya, proses distribusi bantuan sosial sering terlambat, bahkan ada masyarakat yang merasa tidak puas dengan hasil pendataan. (Zaliluddin et al., 2020) menyatakan bahwa “permasalahan bansos pada level desa bukan hanya soal dana, tetapi juga sistem administrasi yang belum efisien dan minimnya kapasitas aparatur desa.”

Masalah lain adalah rendahnya transparansi dalam penyaluran bansos. Masyarakat tidak selalu mendapatkan akses informasi mengenai kriteria penerima, jumlah bantuan, maupun mekanisme distribusinya. Hal ini menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah desa. Padahal, transparansi

merupakan prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut (Mukhtar et al., 2021), “transparansi dalam pengelolaan program bantuan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.”

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan utama yang dapat dirumuskan adalah:

1. Pendataan penerima bantuan sosial masih manual sehingga rawan kesalahan.
2. Terjadi duplikasi data penerima yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran.
3. Minimnya transparansi distribusi bansos yang menurunkan kepercayaan masyarakat.
4. Keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan data berbasis digital.

Dengan demikian, diperlukan solusi berupa sistem pengelolaan bansos berbasis administrasi desa yang lebih modern dan akuntabel.

3.2 Landasan Teori

Teori yang menjadi dasar dalam pengelolaan bantuan sosial berbasis administrasi desa adalah konsep Sistem Informasi Manajemen (SIM). Menurut (Laudon & Laudon, 2019), SIM adalah “sebuah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan.” Dalam konteks desa, SIM dapat digunakan untuk mengelola data penerima bansos secara akurat dan cepat.

Selain itu, konsep E-Government juga menjadi dasar teoritis dalam perancangan sistem ini. Menurut (Indrajit, 2018), “e-government merupakan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat, meningkatkan transparansi, serta memperluas partisipasi publik.” Dengan e-government, desa dapat menghadirkan tata kelola bansos yang lebih transparan dan efisien.

Teori lain yang relevan adalah Database Management System (DBMS). Sistem ini memungkinkan data penerima bantuan disimpan dalam basis data yang terintegrasi, sehingga meminimalkan duplikasi dan kesalahan input. Menurut (Supiyandi et al., 2022), “DBMS sangat efektif dalam mendukung integrasi data, validasi, dan penyajian laporan secara otomatis.”

Dengan mengacu pada teori-teori tersebut, maka perancangan sistem pengelolaan bansos di Desa Bumi Jaya akan berorientasi pada peningkatan akurasi data, efisiensi administrasi, serta transparansi kepada masyarakat.

3.3 Metode yang Digunakan

3.3.1 Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses administrasi bansos di Kantor Desa Bumi Jaya. Penulis memperhatikan alur pendataan, mulai dari pengumpulan data warga, validasi, hingga distribusi bantuan. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar pencatatan masih menggunakan dokumen fisik, sehingga rawan terjadi kesalahan. Dengan observasi ini, penulis dapat mengidentifikasi kelemahan sistem manual dan

menemukan aspek yang perlu diperbaiki melalui sistem berbasis teknologi.

3.3.2 Wawancara

Wawancara dilakukan dengan perangkat desa, khususnya kepala urusan kesejahteraan dan sekretaris desa. Wawancara bertujuan untuk mengetahui kendala yang mereka hadapi dalam pengelolaan bansos. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa masalah utama terletak pada kesulitan dalam validasi data dan keterbatasan tenaga untuk mengelola pencatatan manual. Informasi dari wawancara menjadi dasar dalam merancang sistem yang sesuai kebutuhan desa.

3.3.3 Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan menelaah jurnal, buku, dan laporan penelitian terkait pengelolaan bansos dan penerapan sistem informasi di desa. Melalui studi ini, penulis menemukan bahwa penerapan sistem informasi mampu mengurangi kesalahan administrasi dan meningkatkan transparansi. Hasil studi literatur juga digunakan sebagai landasan teori dalam menyusun rancangan sistem yang diusulkan.

3.3.4 Perancangan System

Perancangan sistem dilakukan dengan metode System Development Life Cycle (SDLC), yang meliputi tahap analisis kebutuhan, desain, implementasi, dan evaluasi. Sistem dirancang berbasis database, dengan fitur utama yaitu input data warga, validasi NIK, laporan penerima bantuan, serta dashboard monitoring. Perancangan ini disesuaikan dengan kapasitas

perangkat desa agar mudah dioperasikan.

3.4 Rancangan Program yang Akan Dibuat

Rancangan program yang akan dibuat adalah sistem pengelolaan bantuan sosial berbasis administrasi desa yang dapat membantu perangkat Desa Bumi Jaya dalam mengelola data penerima bansos secara lebih akurat dan transparan. Sistem ini dirancang berbasis database dengan tampilan antarmuka sederhana agar mudah digunakan oleh perangkat desa.

a. Fitur utama sistem meliputi:

1. **Input Data Warga** : Perangkat desa dapat memasukkan data penerima bansos berdasarkan NIK dan KK. Sistem akan melakukan validasi otomatis untuk mencegah duplikasi.
2. **Klasifikasi Jenis Bantuan** : Sistem dapat mengelompokkan penerima berdasarkan jenis bantuan (PKH, BLT-DD, BPNT).
3. **Laporan Otomatis** : Perangkat desa dapat mencetak laporan penerima bantuan secara cepat dan terintegrasi.
4. **Dashboard Monitoring** : Kepala desa dan perangkat terkait dapat memantau jumlah penerima bantuan secara real-time.
5. **Transparansi Data** : Sistem dapat menampilkan daftar penerima bantuan di papan informasi digital yang dapat diakses masyarakat.

Implementasi sistem ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari pelatihan perangkat desa untuk memahami cara penggunaan sistem. Selanjutnya, dilakukan uji coba input data penerima bantuan dan validasi hasil laporan.

Setelah tahap uji coba berhasil, sistem akan digunakan secara penuh dalam administrasi bansos desa.

Dengan rancangan program ini, diharapkan permasalahan yang selama ini dihadapi Desa Bumi Jaya dapat teratasi. Pendataan menjadi lebih akurat, proses distribusi lebih cepat, dan transparansi meningkat. Pada akhirnya, penerapan sistem ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.